
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA TERNATE DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

Sitti Nurkhalisa H. Habib¹, Jullie J. Sondakh², Steven J. Tangkuman³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Timur, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: nurkhalisahabib@gmail.com

ABSTRACT

In the city of Ternate and the City of Tidore Islands, every year the number of taxpayers registered with SAMSAT continues to increase. However, with the increasing number of motor vehicle taxpayers, the number of taxpayers who pay taxes is not compensated for. The number of taxpayers who are in arrears in paying motor vehicle taxes in the City of Ternate and the City of Tidore Islands shows that the level of taxpayer compliance is still low in paying their taxes. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in the city of Ternate and the city of Tidore Islands. This type of research is quantitative, with the method of collecting data through questionnaires. Based on the Slovin formula, a sample of 100 taxpayers was obtained. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results in this study state that taxpayer awareness has an effect on compliance with motorized vehicle taxpayers in the city of Ternate, but the results are different from what was done in the city of Tidore which said that taxpayer awareness had no effect on motor vehicle taxpayer compliance. motor vehicle tax compliance in the city of Ternate and in the city of Tidore..

Keywords : taxpayer awareness, taxation sanctions, taxpayer compliance.

1. PENDAHULUAN

Hampir seluruh daerah Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan peraturan daerah, hak pengukutnya dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai pembangunan daerah dan juga membiayayai pengeluaran pemerintah daerah yang berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber penghasilan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembiayaan pembangunan daerahnya dilihat dari keadaan yang terjadi saat ini banyak wajib pajak yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum sehingga taraf daya beli wajib pajak terhadap kendaraan bermotor terus meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Samsat menunjukkan bahwa di kota Ternate dan kota Tidore Kepulauan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahun mengalami kenaikan. Namun, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan pembayaran pajaknya. Dilhat dari data yang diperoleh dari pihak Samsat menunjukkan bahwa Di kota Ternate dari tahun 2018 sampai tahun 2021 yang menunggak pajak kendaraan bermotor semakin tinggi. Tahun 2021 yang menunggak pajak kendaraan bermotor di kota Ternate mencapai 82.678 wajib pajak. Sama halnya dengan di kota Tidore Kepulauan setiap tahun yang menunggak pajak kendaraan bermotor juga semakin banyak. Pada tahun 2018 terlihat ada 7,810 wajib pajak yang menunggak, tahun 2019 yang menunggak pembayaran pajak bertambah tinggi menjadi 9.433 begitu seterusnya sampai

pada tahun 2021 mencapai 14.686 penunggak. Hal ini sebagai tolak ukur bahwa sangat signifikan sekali kenaikan jumlah yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor baik di kota Ternate maupun kota Tidore Kepulauan. Melihat banyak sekali masyarakat di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya menunjukkan bahwa masih kurang kepatuhan wajib pajak tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018:10) Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Menurut Reviandani & Pristyadi (2019:2) Akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan (*record*), peringkasan (*summerizing*) transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi dan melaporkan atau menyajikan serta menafsirkan (*interpret*) hasilnya

2.2 Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan Undang-undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tujuan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Supriyadi&Wardana, 2019:3).Akuntansi Pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat dengan mudah menyusun SPT (Maulamin & Sartono, 2021:2).

2.3 Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2018:3),Dengan tidak menerima jasa timbal balik yang dapat dipertunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, maka orang pribadi menyumbang kepada kas negara melalui pajak yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).

2.4 Pajak Daerah

Menurut Rahayu (2017:50)Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Semua kendaraan beroda dan trailernya dikenal sebagai kendaraan bermotor. Mereka digunakan di semua jenis jalan dan digerakkan oleh motor atau peralatan teknis lainnya yang mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga bergerak (Anggoro, 2017:119). Objek PKB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor sedangkan subjeknya yaitu yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor baik orang pribadi atau badan.

2.6 Akuntansi Perilaku

Akuntansi perilaku membahas tentang bagaimana perilaku orang mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan bisnis, dan bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi perilaku orang dan keputusan bisnis (Supriyono, 2018). Teori akuntansi keperilakuan menjelaskan bahwa informasi ekonomi dapat ditambah dengan tidak hanya melaporkan data-data keuangan saja, tetapi juga data-data non keuangan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku (Oktaviani,Kurnia, Sunarto, & Udin, 2017). Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri, yang

menentukan apakah faktor internal atau eksternal mempengaruhi perilaku seseorang. Teori atribusi penelitian ini tepat digunakan sebagai teori pendukung karena teori atribusi menjelaskan perilaku wajib pajak yang disebabkan oleh pengaruh internal (kesadaran wajib pajak) dan pengaruh eksternal (sanksi pajak) yang mengubah sikap seseorang yaitu sikap untuk melakukan pembayaran, pajak.

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak ketika melakukan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh ialah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.8 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

2.9 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan adalah Salah satu cara yang paling penting untuk mendidik wajib pajak yang tidak mengikuti aturan adalah melalui sanksi perpajakan. Wajib pajak menyepelekan peraturan perpajakan akibat longgarnya sanksi pajak. Karena keadaan tersebut, wajib pajak terpaksa membayar pajak setiap lima tahun atau tidak membayar sama sekali (Cong dan Agoes, 2019)

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan pendekatan asosiasif. Penelitian asosiatif ialah suatu pertanyaan riset dengan sifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2018:63).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini melibatkan 125.775 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Ternate dan 40.067 wajib pajak pada Kantor Samsat Kota Tidore Kepulauan. Sehingga total keseluruhan populasi di dalam riset ini yakni sebanyak 165.842 wajib pajak. Sampel pada penelitian ini di hitung menggunakan rumus slovin sehingga di dapat 100 wajib pajak yang dibagi dua yaitu 50 untuk wajib pajak kota Ternate dan 50 wajib pajak kota Tidore Kepulauan.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data

Jenis data pada riset ini yakni data kuantitatif dengan sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil pengisian kuesioner yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dan data sekundernya diperoleh dari data-data yang didapat baik saat di Samsat maupun kepustakaan serta literatur lainnya sebagai penghimpun teori dan landasarn teoritis. Metode pengumpulan datanya dengan cara membagikan kuesioner pada dua subjek berbeda.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode Analisis data yang digunakan pada riset ini yakni Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan alat bantu *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 16. Terdapat beberapa tahapan pengujian yaitu, pertama uji kualitas data, kedua melakukan uji asumsi klasik, ketiga uji hipotesis, dan yang terakhir uji koefisien determinasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir pertanyaan	R hitung	R table	Keterangan
Kesadaran Waji Pajak (X1)	X1.1	0,843	0,1966	Valid
	X1.2	0,810	0,1966	Valid
	X1.3	0,516	0,1966	Valid
	X1.4	0,565	0,1966	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,810	0,1966	Valid
	X2.2	0,816	0,1966	Valid
	X2.3	0,823	0,1966	Valid
	X2.4	0,852	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,742	0,1966	Valid
	Y.2	0,768	0,1966	Valid
	Y.3	0,698	0,1966	Valid
	Y.4	0,557	0,1966	Valid

Sumber : Data olah, 2022

Hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0,1966, maka dapat dikatakan bahwa item-item pertanyaan pada setiap variabel valid.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,614	Reliable
Sanksi Perpajakan	0,843	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0,616	Reliable

Sumber : Data olah, 2022

Hasil uji Reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* dai variabel pada penelitian ini nilainya <0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliable*.

4.1.3 Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82949333
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.067
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.776
Asymp. Sig. (2-tailed)		.584

Sumber : Data olah, 2022

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai dari *Kolmogorov-Smirnovnya* 0,776 dan *Asymp.Sig (2-tailed)* 0,584 > 0,05 yang artinya memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, data yang diolah dapat dipercaya karena berdistribusi normal.

4.1.4 Uji Multikolinieritas

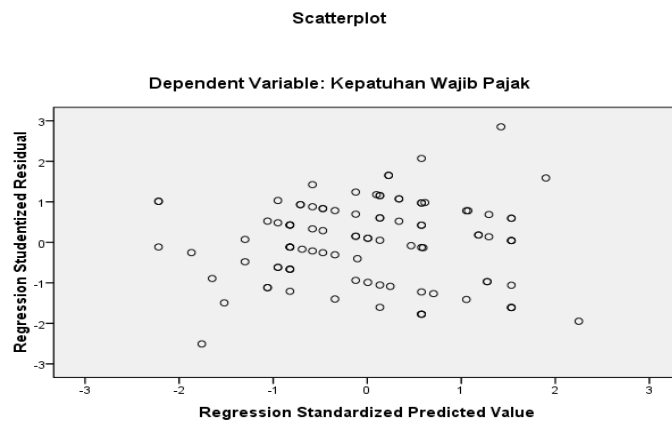
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	.957	1.045
Sanksi Perpajakan	.957	1.045

Sumber : Data olah 2022

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance pada setiap variabel nilainya lebih besar dari 0,10. Selain itu untuk nilai VIF semua variabel memiliki nilai 1,045 < 10, sehingga semua variabel yang digunakan dalam model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.1.5 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data olah, 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada grafik *scatter plot* terlihat titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu X dan Y yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.6 Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda Kota Ternate

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.142	2.376		2.165	.036
X1	.188	.114	.211	1.649	.106
X2	.451	.133	.436	3.406	.001

Sumber : Data olah, 2022

Diperoleh persamaan regresi linier berganda di kota Ternate sebagai berikut :

$$Y = 5,142 + 0,188 X_1 + 0,451 X_2 + e$$

Nilai konstanta sebesar 5,142 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diduga tidak terdapat perubahan (konstan) sehingga nilai dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate bernilai positif.

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda Kota Tidore Kepulauan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.126	2.126		2.882	.006
X1	.322	.138	.308	2.336	.024
X2	.266	.121	.291	2.207	.032

Sumber : Data, olah 2022

Diperoleh persamaan regresi linier berganda di kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:

$$Y = 6,126 + 0,322 X_1 + 0,266 X_2 + e$$

Nilai konstanta sebesar 6,126 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diduga tidak terdapat perubahan (konstan) sehingga nilai dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan bernilai positif.

4.1.7 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji t Kota Ternate

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.142	2.376		2.165	.036
X1	.188	.114	.211	1.649	.106
X2	.451	.133	.436	3.406	.001

Sumber : Data olah, 2022

Tabel 8. Hasil Uji t Kota Tidore

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.126	2.126		2.882	.006
X1	.322	.138	.308	2.336	.024
X2	.266	.121	.291	2.207	.032

Sumber : Data olah, 2022

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengujian kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate diperoleh nilai t hitung < t tabel ($1,649 < 1,677$) dan nilai signifikannya $0,106 > 0,05$ sehingga H_0 di tolak dan H_0 di terima, yang artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate
2. Pengujian kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan diperoleh t hitung > t tabel ($2,336 > 1,677$) dan nilai signifikannya $0,024 < 0,05$ sehingga H_0 di tolak dan H_a di terima, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan.

3. Pengujian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota ternate diperoleh t hitung > t tabel (3,406 > 1,677) dan nilai signifikannya 0,001 < 0,05 sehingga H03 di tolak dan Ha3 di terima, yang artinya variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate.
4. Pengujian sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan diperoleh t hitung > t tabel (2,207 > 1,677) dan nilai signifikan kesadaran wajib pajak adalah 0,032 < 0,05 sehingga H04 di tolak dan Ha4 di terima yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tidore kepulauan.

4.1.8 Uji beda Independen sampel t-test

Tabel 9. Hasil Uji Beda

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
hasil kepatuhan koa ternate dan kota tidore	Equal variances assumed	.148	.701	-2.412	98	.018	-.96000	.39793	-1.74969	-.17031
	Equal variances not assumed			-2.412	97.808	.018	-.96000	.39793	-1.74971	-.17029

Sumber : Data olah, 2022

Diperoleh nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,018<0,05 sehingga H05 di tolak dan dan Ha5 di terima yang artinya terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak antara kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

4.1.9 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.457 ^a	.209	.192	1.81275

Sumber : Data olah 2022

Menunjukkan nilai dari Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,209 atau senilai 20,9%. Hal ini berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan sebesar 20,9% dari kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dan sisanya 79,1% dapat dijelaskan oleh variabel diluar dari variabel dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat kota Ternate

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate. Namun berdasarkan hasil pengujian analisis data kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate Hal ini menjelaskan tingginya kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agutin dan Putra (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4.2.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota Tidore Kepulauan

Hipotesis kedua (H₂) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan. Hasil pengujian analisis data menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, Ferdian, dan Girsang (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada kota Ternate.

4.2.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat kota Ternate

Hipotesis ketiga (H₃) dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate. Hasil pengujian analisis data menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate. Hal ini menunjukkan apabila sanksi perpajakan yang diberikan lebih tegas maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ternate akan meningkat. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Barlan dan Laekkeng, dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan.

4.2.4 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota Tidore Kepulauan

Hipotesis keempat (H₄) dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan. Hasil pengujian analisis data menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan. Hal ini menunjukkan baik di kota ternate maupun kota tidore kepulauan sanksi perpajakan sama pentingnya terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil Penelitian ini juga sama dengan penelitian Aditya, Mahaputra, & Sudiartana (2021) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.2.5 Prefensi Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan

Hipotesis kelima (H₅) dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Hasil pengujian analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak di kota ternate berbeda dengan kepatuhan wajib pajak di kota Tidore Kepulauan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan.

3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Ternate.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tidore Kepulauan.
5. Terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kota Ternate dan kota Tidore Kepulauan.

5.2. Saran

1. Bagi wajib pajak agar lebih meningkatkan kesadaran dalam diri masing-masing akan kewajiban dan pentingnya membayar pajak untuk daerah.
2. Bagi Samsat agar dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan akan sanksi yang didapat apabila menunggak pembayaran pajak dan juga lebih tingkatkan lagi pelayanan yang di berikan agar wajib pajak nyaman dalam melakukan pembayaran.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini karena masih terdapat pengaruh 79,1% diluar dari variabel yang diteliti, agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 187-199.
retrieved from : <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/1629>
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 13(1), 55-62.
doi : <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 168-178.
doi : <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.597>
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 292-299.
doi : <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4702>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI
- Maulamin, T., & Sartono. (2021). Akuntansi Perpajakan. Tangerang. PT Human Persona Indonesia.
- Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S., & Udin, U. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89-96.
doi : <http://dx.doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung : Rekayasa Sains
- Reviandani, W. & Pristyadi, B. (2019). Pengantar Akuntansi. Sidoarjo : Pindomedia Pustaka
- Romney, Marshall B. & Paul John Steinbart. (2018). Accounting Information System. Fourteenth Edition. Pearson Education Limit: New Jersey
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta

Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 29-45.

retrieved from : <https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>

Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi keperilakuan. Ugm Press

Supriyadi, S.E., & Wardana, A. B. (2019). Praktikum Akuntansi Pajak. Yogyakarta: ANDI